

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU DI SMP NEGERI 1 TANJUNGBALAI

Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Astri Natasi Janu Erhan

Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

This study aims to determine the effect of accountability and transparency in the management of budget and expenditure income (APBS) on the performance of teachers in the state junior high school 1 Tanjungbalai. This type of research is associative/quantitative, with the population and sampel used are all teachers in public junior high school 1 Tanjungbalai. The type of data is primary data in the form of questionnaire results. Data analysis techniques using multiple regression analysis. The result of the questionnaire indicate that accountability of the management of APBS has a positive and significant effect on teacher performance, where $t_{count} 3,475 > t_{table} 2,048$ dan significant $0,002 < 0,05$, the transparency of the management of APBS has a positive and significant effect on teacher performance $t_{count} 2.682 > t_{table} 2,048$ dan significant $0,010 < 0,05$, and the result show that simultaneous accountability and transparency in the management of budget and expenditure income (APBS) a positive and significant effect on the performance of teachers where $F_{count} 8,333 > F_{table} 3,33$ and significant $0,001 < 0,05$.

Keyword : Accountability, Transparency, and Teacher performance

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Halim dalam Herawaty (2012), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju *clean government* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian

merupakan tindakan pada pencapaian tujuan. Begitu juga dengan halnya transparansi yang juga harus ada dalam administrasi keuangan negara, daerah ataupun suatu lembaga.

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi adalah: “Keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”. Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik (UU Nomor.2 Tahun 2011). Dengan demikian, transparansi adalah informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Menurut Mahsun (2016:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut Haryanto (2009) kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Menurut Rusman (2012) kinerja guru merupakan wujud perilaku atau kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai hasil belajar. Dengan demikian, kinerja adalah hasil kegiatan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Guru merupakan ujung tombak dalam mendidik dan mengajar ilmu kepada siswa sehingga siswa mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karenanya seorang guru pada akhirnya dituntut memiliki kompetensi yang dapat mendukung kinerja yang baik dan profesional. Kinerja guru dapat dilihat dari proses pembelajaran, mengingat proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Kinerja guru menjadi tuntutan penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga secara jelas telah menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Kinerja guru bukan hanya diukur dari proses belajar mengajar tetapi juga didukung dengan tugas tambahan yaitu menjadi wali kelas, pembina OSIS, pembina kegiatan ekstrakurikuler dan menjadi guru piket. Dalam melaksanakan tugas tambahan tersebut para guru mendapat gaji tambahan dalam melakukan tugasnya yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berasal dari dana BOS (Bantuan Operasioan Sekolah) yaitu sebuah bantuan dana untuk sekolah yang menjadi program pemerintah untuk membantu sekolah dalam pendanaan biaya operasional non personalia. Dana BOS sendiri diberikan pemerintah dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar biaya pendidikan. Dana BOS bersumber dari dana APBN dengan penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Akan tetapi guru dan warga sekolah tidak

mengetahui secara jelas mengenai pengelolaan anggaran tersebut baik yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah tidak pernah memberikan informasi tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap guru dan warga sekolah. Sehingga menyebabkan kinerja guru dalam melakukan proses belajar mengajar menurun, seperti seringnya guru-guru tidak masuk ke dalam kelas untuk melakukan proses belajar mengajar dan tidak mengerjakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler dengan semestinya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai ?
2. Apakah transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai ?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai.
2. Mengetahui transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh secara parsial terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai.
3. Mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh secara simultan kinerja guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk mata uang rupiah dan diproyeksikan untuk jangka waktu atau periode tertentu. Selain itu anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) juga menggambarkan alokasi dan distribusi sumber-sumber keuangan kepada setiap bagian aktifitas sekolah. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber pendapatan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Lebih dari itu masing-masing sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi distribusi anggaran. Hanya saja sekolah tetap memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim keuangan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan ini berbeda jauh dengan era sebelumnya (orde baru), dimana sentralisasi penganggaran sangat kuat, sampai kewenangan membeli peralatan sekolah, kantor dan lain-lain direalisasikan disekretariat negara.

b. Jenis-Jenis Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terbagi menjadi dua yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin adalah anggaran yang

diperuntukkan untuk pemenuhan kapasitas kelembagaan internal dalam rangka pelaksanaan program pembelajaran. Pengeluaran anggaran rutin dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan biaya perjalanan. Sedangkan anggaran pembangunan adalah anggaran diperuntukkan untuk keperluan program mulai dari sarana, prasarana sampai kebutuhan teknis lainnya. Pengeluaran anggaran pembangunan mencakup biaya pembangunan berkaitan dengan keseluruhan pengeluaran anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan, misal pengadaan gedung dan fasilitas lainnya.

c. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) memiliki fungsi sebagai pedoman karena berisi program kerja sekolah yang utuh dan memuat prakiraan pendapatan dan pengeluaran sekolah dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dan pelajaran di sekolah, dalam periode waktu satu tahun pelajaran. Dan sebagai pilar manajemen sekolah karena semua kegiatan sekolah yang teknis dan non teknis (pendanaan) direncanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tidak dapat disusun jika sekolah belum menyusun program kerja, sekolah tidak memiliki sumber dana yang pasti, sekolah tidak tahu secara pasti aspek apa saja yang harus dipercayai, sekolah tidak mempunyai data yang jelas dan pasti tentang jumlah murid, jumlah guru dan karyawan

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Halim dalam Herawaty (2012), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

b. Fungsi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009 : 69) agar dapat berfungsi dengan baik, dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas perlu diterapkan :

- 1) Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program. Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah menembangkan suatu pernyataan dengan cara konsisten. Pada dasarnya tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan dibuat terlalu luas sehingga terlalu sulit pengukurannya. Untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur.
- 2) Pola pengukuran tujuan, setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan hasil. Memilih indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program memerlukan cara dan

metode tertentu agar indikator terpilih dapat mencapai hal yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

- 3) Pengakomodasian sistem intensif, suatu sistem intensif perlu disertakan dalam sistem dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem intensif harus diterapkan dengan hati-hati, karena adakalanya sistem intensif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.
- 4) Pelaporan dan penggunaan data, suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pemimpin, pembuat keputusan dan program serta masyarakat.
- 5) Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.

c. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:21) akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal/Internal (*vertical accountability*)

Setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

2) Akuntabilitas Horizontal/Eksternal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya (*public or external and environment*).

d. Indikator Akuntabilitas

Menurut Sulistoni (2010:35) pemerintah yang *accountable* memiliki indikator sebagai berikut :

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah.
- 4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara profesional, dan
- 5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi adalah: “Keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”. Menurut Meutiah (2008) prinsip dasar transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawas. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan

dibuat berdasarkan pada referensi publik. Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu : komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

b. Manfaat Transparansi

Menurut Sri Minarti (2011:224) mengemukakan bahwa “ Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik, antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai”. Dari pendapat ahli di atas tentang manfaat transparansi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari transparansi yaitu menerapkan peraturan agar tidak terjadinya kecurangan.

c. Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) Indikator transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut :

1) Informatif

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2) Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.

3) Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

4. Kinerja Guru

Menurut Mahsun (2016:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut Haryanto (2009) kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Menurut Rusman (2012) kinerja guru merupakan wujud perilaku atau kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai hasil belajar. Dengan demikian, kinerja adalah hasil kegiatan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan.

a. Indikator Kinerja

Menurut Mahsun (2016:77) adapun indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Masukan (*input*)

Adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan dan sebagainya.

2) Proses (*proses*)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan urusan kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah masukan. Sedangkan ekonomis

adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya dan waktu yang telah ditentukan.

- 3) Hasil (*outcome*)
Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- 4) Manfaat (*benefit*)
Adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 5) Dampak (*inpact*)
Adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

b. Indikator Kinerja Guru

Menurut Usman (2002) ada beberapa indikator yang dapat dilihat peran guru dalam meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar yaitu :

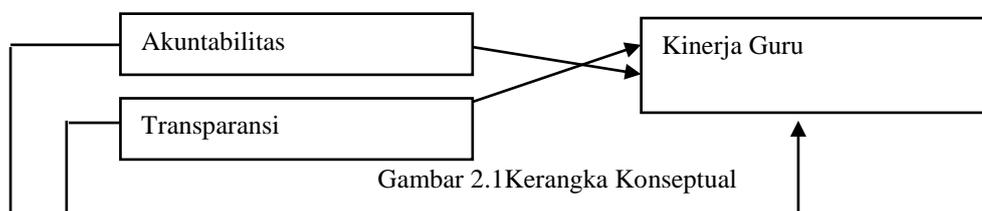
- a) Kemampuan merencanakan belajar mengajar, yaitu menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan, menyesuaikan analisa materi pelajaran, menyusun program semester, dan menyusun program atau pembelajaran..
- b) Kemampuan mengevaluasi, yaitu evaluasi normative, evaluasi formativ, laporan hasil evaluasi, dan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.

Sedangkan menurut Depdikbud dalam Uno (2009:70) indikator kinerja guru adalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan mengajar dalam kelas, yaitu menggunakan metode, media dan bahan latihan, berinteraksi dengan siswa, mendemonstrasikan khazanah metode mengajar, mendorong dan mengarahkan ketertiban siswa dalam kelas, mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran, mengorganisasikan waktu, ruang dan bahan perlengkapan, serta melakukan evaluasi hasil belajar.
- 2) Kemampuan mengadakan hubungan antara pribadi siswa, yaitu membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa, bersikap terbuka dan luwes terhadap siswa dan orang lain serta menampilkan kegairahan dan kesanggupan dalam kegiatan belajar mengajar pelajaran yang diajarkan.

B. Kerangka Konseptual

Dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS), dana ini bersumber dari APBN. Maka pengelola dana harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan dapat meningkatkan kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Dalam kerangka konsep ini dijelaskan hubungan antara akuntabilitas, transparansi terhadap kinerja. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan APBS SMP Negeri 1 Tanjungbalai maka semakin tinggi pula tingkat kinerja guru secara parsial. Begitu pula dengan transparansi, semakin transparan suatu pengelolaan APBS SMP Negeri 1 Tanjungbalai maka semakin tinggi pula tingkat kinerja guru secara parsial. Dengan demikian semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBS SMP Negeri 1 Tanjungbalai maka semakin tinggi pula tingkat kinerja guru secara simultan. Berikut ini gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

Model Analisis Data yang digunakan penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Tujuan dari teknik analisis linier berganda adalah untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel terikat, dengan rumus sebagai berikut:

$$PTOM = \beta_0 + \beta_1 Ak + \beta_2 Tr + e$$

Keterangan :

- Y = Variabel dependen (Kinerja Guru/PTOM)
 β_0 = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien regresi
 X1 = Variabel independen (Akuntabilitas/Ak)
 X2 = Variabel independen (Transparansi/Tr)
 e = error term/Tingkat kesalahan

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengolahan Data

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel bebas yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu kinerja guru. Dalam penyebaran angket, masing-masing butir pertanyaan dari setiap variabel diisi oleh responden sebanyak 31 orang dimana jawaban angket yaitu : a. skor 4 b. skor 3 c. skor 2 d. skor 1. Data hasil jawaban responden adalah sebagai berikut :

a. Uji Validitas Kuisiner Penelitian

Tabel 4.1 Uji Validitas (X1) Pertanyaan-Pertanyaan pada Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| X1.1 | 27.06 | 7.529 | .295 | .554 |
| X1.2 | 27.06 | 5.862 | .217 | .379 |
| X1.3 | 27.03 | 5.632 | .283 | .353 |
| X1.4 | 27.13 | 5.249 | .589 | .266 |
| X1.5 | 27.16 | 5.073 | .618 | .244 |
| X1.6 | 27.35 | 5.570 | .262 | .358 |
| X1.7 | 27.13 | 6.049 | .114 | .417 |
| X1.8 | 27.19 | 6.095 | .128 | .410 |
| X1.9 | 27.26 | 5.931 | .076 | .441 |
| X1.10 | 27.35 | 6.437 | .054 | .461 |

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, nilai *Corrected Item-Total Correlation* > 0.30 yang artinya semua butir pertanyaan kuisiner adalah valid.

Tabel 4.2. Uji Validitas (X2) Pertanyaan-Pertanyaan pada Variabel Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| X2.1 | 15.06 | 2.996 | .357 | .613 |
| X2.2 | 15.26 | 1.931 | .252 | .209 |
| X2.3 | 15.23 | 1.781 | .329 | .142 |
| X2.4 | 15.32 | 1.892 | .368 | .143 |
| X2.5 | 15.29 | 1.680 | .498 | .029 |
| X2.6 | 15.29 | 2.080 | .073 | .344 |

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, nilai *Corrected Item-Total Correlation* > 0.30 yang artinya semua butir pertanyaan kuisioner adalah valid.

Tabel 4.3.Uji Validitas (Y) Pertanyaan-Pertanyaan pada Variabel Kinerja Guru Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Y.1 | 24.48 | 3.658 | .121 | .305 |
| Y.2 | 24.42 | 3.785 | .165 | .325 |
| Y.3 | 24.42 | 2.985 | .313 | .055 |
| Y.4 | 24.58 | 2.585 | .560 | .106 ^a |
| Y.5 | 24.65 | 2.770 | .347 | .006 |
| Y.6 | 24.58 | 3.052 | .255 | .085 |
| Y.7 | 24.55 | 3.256 | .115 | .161 |
| Y.8 | 24.68 | 3.026 | .136 | .140 |
| Y.9 | 24.81 | 4.361 | .371 | .458 |

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, nilai *Corrected Item-Total Correlation* > 0.30 yang artinya semua butir pertanyaan kuisioner adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika mempunyai nilai alpha positif dan lebih besar dari 0,60. Semakin besar nilai alpha, maka alat pengukur yang digunakan semakin handal (reliabel).Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas pada variabel Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan Kinerja Guru.

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas

| Variabel | Nilai Cronbach's Alpha |
|---|------------------------|
| Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) (X1) | .703 |
| Transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) (X2) | .624 |
| Kinerja guru | .821 |

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Nilai alpha positif pada setiap butir pertanyaan atau kuisioner lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah memenuhi kriteria reliabel.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka probabilitas dengan ketentuan, jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika probabilitas $< 0,05$ maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel 4.5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 31 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.53727886 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .086 |
| | Positive | .086 |
| | Negative | -.054 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .480 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .975 |

Test distribution is Normal.

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Nilai probabilitas p dapat dilihat pada Asymp.Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,975 nilai tersebut lebih besar dari 0,005. Hal ini menunjukkan asumsi normalitas terpenuhi.

2) Uji Multikolinearitas

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. *Variance inflation factor* (VIF) = $1/\text{Tolerance}$, jika $VIF = 0$ maka $1/10 = 0,1$. Berikut ini hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

| Coefficients ^a | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 10.367 | 4.423 | | 2.344 | .026 | | |
| | Akuntabilitas | .388 | .112 | .524 | 3.475 | .002 | .984 | 1.017 |
| | Transparansi | .305 | .181 | .254 | 1.682 | .104 | .984 | 1.017 |

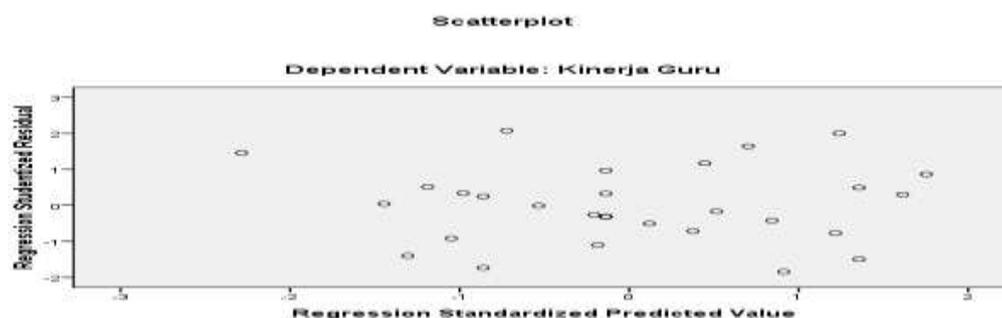
Dependent Variable: Kinerja Guru

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah akuntabilitas $1,017 < 10$ dan Transparansi $1,017 < 10$ serta nilai *Tolerance* akuntabilitas $0,984 > 0.10$ dan transparansi $0,984 > 0,10$ sehingga terbebas dari multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. Menurut Ghozali (2011:139) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Gambar 4.1 Scaterplot- Uji Heteroskedastisitas

Gambar Scaterplot di atas menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk pola atau garis tertentu. Gambar juga menunjukkan bahwa titik-titik juga menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan kata lain variabel yang akan diuji pada penelitian ini bersifat homokedastis.

d. Pengujian Hipotesis

1) Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel bebas (Independent). Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut :

Tabel 4.7 Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 10.367 | 4.423 | | 2.344 | .026 |
| Akuntabilitas | .388 | .112 | .524 | 3.475 | .002 |
| Transparansi | .305 | .181 | .254 | 2.682 | .010 |

a. Dependen Variabel : Kinerja Guru

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas telah diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut : $PTOM = 10,367 + 0,388 Ak + 0,305 Tr$

2) Uji F (Uji Simultan)

Menurut Priyatno (2012) uji signifikan pada dasarnya menunjukkan apakah suatu semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Cara yang digunakan adalah melihat *level of significant* ($=0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak H_a diterima.

Tabel 4.8 Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 42.200 | 2 | 21.100 | 8.333 | .001 ^a |
| | Residual | 70.897 | 28 | 2.532 | | |
| | Total | 113.097 | 30 | | | |

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 dari uji ANOVA atau *F Test* didapat nilai F hitung sebesar 8,333 sedangkan Ftabel sebesar 3,33 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Karena probabilitas 0,001 jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru (H_a diterima dan H_0 ditolak).

3) Uji t (Uji Parsial)

Menurut Priyatno (2012) uji signifikan parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak.

Tabel 4.9 Uji t (Uji Parsial)

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 10.367 | 4.423 | | 2.344 | .026 | | |
| Akuntabilitas | .388 | .112 | .524 | 3.475 | .002 | .984 | 1.017 |
| Transparansi | .305 | .181 | .254 | 1.682 | .010 | .984 | 1.017 |

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 10.367 | 4.423 | | 2.344 | .026 | | |
| Akuntabilitas | .388 | .112 | .524 | 3.475 | .002 | .984 | 1.017 |
| Transparansi | .305 | .181 | .254 | 1.682 | .010 | .984 | 1.017 |

a. Dependent Variable: Kinerja Guru

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa Pengaruh akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap kinerja guru. thitung sebesar 3,475 sedangkan ttabel sebesar 2,048 dan signifikan sebesar 0,002 sehingga thitung 3,475 > ttabel 2,048 dan signifikan 0,002 < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Sehingga akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh terhadap kinerja guru. Pengaruh transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) terhadap kinerja guru. thitung sebesar 2.682 sedangkan ttabel sebesar 2,048 dan signifikan sebesar 0,010 sehingga thitung 2.682 > ttabel 2,048 dan signifikan 0,010 < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Sehingga transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh terhadap kinerja guru.

4) Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .611 ^a | .373 | .328 | 1.591 | 1.816 |

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa angka *Adjusted R Square* 0,328 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 32,8% kinerja guru dapat diperoleh dan dijelaskan oleh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Sedangkan sisanya 100% - 32,8% = 67,2% dipengaruhi faktor lain yaitu seperti sertifikasi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan pengembangan profesi guru.

A. Pembahasan

Pengelolaan APBS sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah yang lebih optimal. Hasil penelitian diperoleh akuntabilitas pengelolaan APBS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini sejalan dengan penelitian Daniel Aditya Utama (2014) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dibutuhkan akuntabilitas yaitu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hasil penelitian diperoleh transparansi pengelolaan APBS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini sejalan dengan penelitian Daniel Aditya Utama (2014) jika transparansi pengelolaan keuangan sekolah mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja guru akan mengalami peningkatan. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan meningkatnya transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) maka akan meningkat pula kinerja guru. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan APBS maka pemerintah yang bersih, akuntabel, dan transparan akan dipercaya oleh masyarakat. Jika dikaitkan dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini maka informatif, keterbukaan dan pengungkapan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) perlu diperhatikan dan dikontrol agar tidak adanya kecurangan dalam pengelolaan anggaran.

Hasil menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini sesuai dengan penelitian Daniel Aditya Utama (2014) yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan keuangan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja guru baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) maka kinerja guru juga akan meningkat. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pendidikan sangat penting untuk mengukur kepemimpinan kepala sekolah, tanggungjawab atas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akan mendorong terhadap kepatuhan dan meningkatnya kinerja guru secara optimal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai.
2. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap kinerja guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai.
3. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa 32,8% kinerja guru dapat dijelaskan oleh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dan sisanya 67,2% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti sertifikasi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan pengembangan profesi guru.

B. Saran

1. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS), hendaknya kepala sekolah dapat senantiasa memegang teguh dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) secara konsisten, karena akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) meningkatkan kinerja guru.
2. Bagi komite sekolah agar memperhatikan para pengelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) sebagai salah satu bentuk usaha meningkatkan kepercayaan publik.

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel dan objek penelitian agar dapat memperluas ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Boy,Denny.,Hotniar Siringoringo. 2009. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid, *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 12 Vol. 14.
- D, L. M. 2009. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Komite Sekolah. *Akuntansi Keuangan*No.1 Vol. 3.
- Ghozali, I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. 2009. *Pengukuran Kinerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara*
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Meutiah Ganie Rochman. 2000. *Perubahan Pemerintahan: Good governance* .
- Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muwarti, Hesti. 2013. *Pengaruh Sertifikasi Profesi Guru Terhadap Motivasi Kerja Dan Kinerja Guru Di Smk Negeri Se-Surakarta*, *Jurnal Pendidikan Bisnis dan ekonomi* No. 1 Vol. 1
- Rusman. 2012. *Model-Model Pembelajaran Pengembangan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solihat, E. 2009. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid di SMA Negeri 107 Jakarta. *Ekonomi Bisnis*, No. 2 Vol. 14.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* . Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. 2014. *Teori Kuisisioner Dan Analisis Data*. Graha Ilmu.
- Tanjung, A. H. 2011. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen.
- Uno, Hamzah B dan Nina Lamatenggo. 2009. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utama, Daniel Aditya. 2014. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru*, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan* No. 02 Vol. 9.
- Usman, Moh.Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offised.
- Priyanto, D. 2012. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS* . Yogyakarta: Gava Media.